

DAFTAR PUSTAKA

Artike Website

- BPK RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Diakses 26 Juni 2026, melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.
- BPK RI. (2016). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*. Diakses 26 Juni 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/156433/perwali-kota-depok-no-111-tahun-2016>.
- BPK RI. (2017). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah*. Diakses 29 Juni 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51722/pp-no-38-tahun-2017>.
- BPK RI. (2018). *Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Diakses 21 Juli 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>.
- BPK RI. (2021). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 40 Tahun 2021 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197713/perwali-kota-depok-no-40-tahun-2021>.
- BPK RI. (2021). *Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintahan Kota Depok*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197834/perwali-kota-depok-no-75-tahun-2021>.
- BPK RI. (2021). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197836/perwali-kota-depok-no-84-tahun-2021>.

- BPK RI. (2023). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/278615/perwali-kota-depok-no-12-tahun-2023>.
- BPS Kota Depok. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok (Jiwa), 2024*. Diakses 21 Oktober 2025, melalui <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMzMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-depok.html>.
- BPS Kota Depok. (2025). *Kecamatan Sukmajaya Dalam Angka 2025*. Diakses 26 Juni 2026, melalui <https://depokkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/35921eb41a639319af1b8330/kecamatan-sukmajaya-dalam-angka-2025.html>.
- Cahyo, A. D. (2018). *DPRD Keluhkan Pelayanan Publik Pemkot Depok*. Diakses 20 Juli 2026, melalui <https://www.gesuri.id/pemerintahan/dprd-keluhkan-pelayanan-publik-pemkot-depok-b1T2yZdfz>.
- Lestari, R. D. (2026). *Depok Genap 27 Tahun, Masyarakat Masih Keluhkan Adanya Pungli di Kecamatan Pancoranmas, Camat Belum Berikan Respon*. Diakses 20 Juli 2026, melalui <https://www.radardepok.com/metropolis/94617049207/depok-genap-27-tahun-masyarakat-masih-keluhkan-adanya-pungli-di-kecamatan-pancoranmas-camat-belum-berikan-respon>.
- Malau, B., & Mutiara, D. A. (2016). *Warga Depok Keluhkan Pungli Pengurusan E-KTP yang Makin Merajalela*. Diakses 20 Februari 2026, melalui https://wartakota.tribunnews.com/2016/04/18/warga-depok-keluhkan-pungli-pengurusan-e-ktp-yang-makin-merajalela?page=all#goog_rewarded.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2021). *Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021*. Diakses 20 Juli 2026, melalui https://dasibangsida.lhokseumawekota.go.id/assets/upload/file/2a_SK_Indeks_Inovasi_Daerah_Tahun_2021.pdf.

- Rama, A. (2025). *Hafid Nasir Beberkan Tugas dan Fungsi Komisi A DPRD Kota Depok : Perizinan sampai Pemerintahan*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://www.radardepok.com/utama/94616200725/hafid-nasir-beberkan-tugas-dan-fungsi-komisi-a-dprd-kota-depok-perizinan-sampai-pemerintahan>.
- Ramadhanty, D. A., & Hidayat, F. (2025). *APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/11/27/18304831/apbd-depok-2026-turun-rp-342-miliar-dibanding-2025-perjalanan-dinas>.
- Silondo Bermula Depok. (2023). *Sistem Layanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bersih, Mudah dan Lancar*. Diakses 30 Juni 2026, melalui <https://silondobermula.depok.go.id/layanan/>.
- Silondo Bermula Sanpel Sukmajaya. (n.d). *Sanpel de Prima Kecamatan Sukmajaya*. Diakses 25 Juni 2026, melalui <https://silondobermula.depok.go.id/forms/sanpel-sukmajaya/0>.

Artikel Jurnal

- Addien, F. U. (2025). Strategi Kemantren Wirobrajan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Bebas Pungutan Liar. *Prosiding Pemerintahan dan Desa*, 1(1).
- Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan*, 6(3).
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Bekkers, V, & Tummers, L. (2018). Innovation in The Public Sector: Towards an open and Collaborative Approach. *International Review of Administrative Sciences*, 84(2).
- Cahyono, S. D., dkk. (2025). Masyarakat, Kekuasaan dan Wewenang Politik. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(12).

- Cinar, E., dkk. (2025). The Political Context of Public Sector Innovation: A Critical Interpretive Synthesis on Ukraine. *Research Policy*, 54(10).
- Farhan, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(2).
- Febriyanti, A., dkk. (2025). Inovasi Pelayanan Publik Terintegrasi Pada Mal Pelayanan Publik Surabaya. *JAPS: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(2).
- Fiqri, I. N., dkk. (2026). Relasi Aktor Politik dan Institusi dalam Tata Kelola Pembangunan Daerah: Sebuah Studi Literatur. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(2).
- Fred, M., & Landgren, D. M. (2024). Promoting Public Sector Innovation: Who Does What, When and How?. *Public Policy and Administration*, 41(2).
- Gugat, R. M. D., dkk. (2022). Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat & LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta. *International Journal of Demos*, 4(1).
- Hambleton, R., & Howard, J. (2013). Place Based Leadership and Public Service Innovation. *Local Government Studies*, 39(1).
- Karima, F., dkk. (2021). Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2020. *Society*, 9(1).
- Luthfia, H. M., dkk. (2026). Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok Kabupaten Klaten. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1).
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Mozin, S. Y., dkk. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis: Jurnal Intergrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).

- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan yang Lebih Baik. *Jurnal Universitas Subang*, 6(1).
- Nurchayyo, S. D., dkk. (2025). Masyarakat, Kekuasaan dan Wewenang Politik. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(12).
- Omachonu, V. K., & Einspruch, N. G. (2010). Innovation in Health Care Delivery Systems: A Conceptual Framework. *The Innovation Journal*, 15(1).
- Pollitt, C. (2000). Is the Emperor in His Underwear? An Analysis of The Impacts of Public Management Reform. *Public Management*, 2, hlm 181-199.
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault. *Thaqafiyat*, 18(2).
- Qoirunnisa, A., & Wahyuni, Y. S. (2025). Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer. *Journal Transformation of Mandalika*, 6(12).
- Raudla, R., dkk. (2025). Budgeting for Innovation: How Funding Strategies Enable or Constrain Public Sector Experimentation. *Public Budgeting & Finance*, 48(4).
- Shahed, M., & Miakhil, P. (2025). The Constituent Elements of the State. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 5(2).
- Suherman, D., dkk. (2024). Relasi Kuasa Dalam Perencanaan Pemekaran Wilayah: Perpektif Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis. *Khazanah Multidisiplin*, 5(2).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).
- Suriadi, H., dkk. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- Widiyahseno, B. (2015). Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3).
- Wijaya. J. H. (2021). Governance Dalam Pelaksanaan E-Government di Indonesia. *JPW: Jurnal Politik Walisongo*, 3(2).

Zarista, E., & Ichsan, M. (2020). The Role of Political Power in The Budgeting Process: How To Accommodate Them? A Case Study. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1).

Buku

Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publication.

Creswell. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE Publication.

Fountain, J. E. (2001). *Building the Virtual: State Information Technology and Institutional Change*. Washington D.C: Brookings Institution Press.

Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing E-Government*. London: SAGE Publications.

Heryani, A., dkk. (2023). *Birokrasi Indonesia*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Ibad, S., & Ulum, M. C. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Aptikom.

Law, J., & Callon, M. (1992). The Life and Death of An Aircraft: A network Analysis of Technical Change. Dalam Bijker, W. E., & Law, J. (1992). *Shaping Technology/Building Society*. Massachusetts: The MIT Press.

Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. Palgrave Macmillan.

Osborne, S. P., & Brown, L. (2013). *Handbook of Innovation in Public Services*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Prabowo, H., dkk. (2022). *Inovasi Pelayanan Organisasi Publik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Setijaningrum, E. (2009). *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: PT. Medika Aksara Globalindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

- Sumbodo, Y. P., dkk. (2024). *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Wicaksono, S. R. (2021). *Konsep Dasar E-Government*. Magelang: CV. Seribu Bintang.
- Wirtz, B. W. (2022). *E-Government: Strategie-Organisation-Technologie*. Jerman: Springer Gabler.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Aminudin. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Disertasi Doktoral. Universitas Tadulako.
- Khasanah, F. M. (2024). Perilaku Aparat Desa: Studi Relasi Kuasa Aliran Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Pada Pemerintahan Desa Lampung. Skripsi. Universitas Lampung.
- Muarofah, S. S. (2023). Relasi Kuasa Tokoh Masyarakat Dengan Masyarakat Dalam Tradisi Baritan di Dusun Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Safitri, I. (2024). Identifikasi Aktor dan Perannya dalam Proses Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan.

Video Youtube

- Disdukcapil Depok. (2025). *Silondo Bermula Solusi Cepat & Digital Urus Dokumen Kependudukan di Depok (KIPP 2025)*. (Video). Youtube. <https://youtu.be/SiIGmDpioJE?feature=shared>.

Dokumen Resmi

- Disdukcapil Kota Depok. (2025). *Data Penerima Manfaat Silondo Bermula Tahun 2025*. Depok: Disdukcapil Kota Depok.
- Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. (2018). *Rencana Strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018-2021*. Depok: Kecamatan Sukmajaya.

- Pemerintah Kota Depok. (2022). *Pemerintah Kota Depok. 2022. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. Depok: Pemerintah Kota Depok.
- PPID Kota Depok. (2021). *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok Tahun 2021*. Diakses 20 Juli 2026, melalui <https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2022/04/RLPPD-2021.pdf>.
- PPID Kota Depok. (2022). *Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan*. Diakses melalui <https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2023/01/APBD-TA-2023-1.pdf>.